

e- ISSN 2580-1236

ISSN 1693-8224

Terbit dua kali setahun setiap Maret dan Oktober

JURNAL KEUANGAN DAN BISNIS

Vol. 19, No. 1, Maret 2021

Pengaruh Desain dan Manfaat Keamanan Terhadap Minat Pembelian FMCG Catharina Clara	1-24
Peran Work Involvement Terhadap Self Efficacy Pelaku Usaha Mikro di Palembang Maria Fransisca Solistiyawati	35-39
Peran Corporate Social Responsibility Bank Jatin Cabang Nganjuk Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Nganjuk Indrian Sephani, Ambarwati, Dwi Puji Rahayu	34-51
Variabel Makroekonomi Yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Indonesia, Thailand, Malaysia, Dan Vietnam Benny Budiawan Tjandrasa, Agus Aribowo, Rodinus Jewart	52-61
Dampak Manajemen Modal Kerja Terhadap Cash Holding Pada Industri Consumer Goods Indonesia Yongki, Rishuan Panjaitan, Farah Margaretha Leon	62-78
Pengaruh Tata Letak, Kualitas, Harga, Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Orientasi Pasar Diva Riza Fahlefi	79-87
Pengaruh Earning Per Share Dan Price Earning Ratio Terhadap Return Saham Ichanis Darwin Borolla, Kricaldya Ester Peksalay	88-104
An Empirical Study On Quality Of Public Accounting Firms In Palembang Muhammad Ichan Siregar, Anisa Listya, Rith Samantha Hamzah, Nur Khamisah, Abdullah Saggaf	105-113
Sistem Informasi Pemasaran Produk Kopi Arabika Gunungmalang Berbasis Android Ria Manung	114-131

Digitalisasi Publikasi Laporan Keuangan Daerah

Pancewati Hardiningsih, Cecilia Srimindari, Afifah Jannah, Maria Yosaphat Dedi
Haryanto

133-146

DIGITALISASI PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN DAERAH

PANCAWATI HARDININGSIH¹

pancawati@edu.unisbank.ac.id

CEACILIA SRIMINDARTI²

caecilia@edu.unisbank.ac.id

AFIFATUL JANNAH³

jannafifatul@edu.unisbank.ac.id

MARIA YOSAPHAT DEDI HARYANTO⁴

mydediharyanto@gmail.com

ABSTRAK

Pengungkapan digitalisasi dinilai mampu menjangkau semua aspek masyarakat dan dapat diakses kapanpun. Kemajuan teknologi akan membuat semua informasi dapat diakses dengan mudah, murah, dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah, aksesibilitas, dan opini audit, terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah secara digital. Populasi dan sampel penelitian adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Provinsi Jawa Tengah sebanyak 29 Pemerintah Kabupaten dan 6 Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2015-2018 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Teknik analisis menggunakan regresi berganda dengan *Fixed Effect Model*. Hasil menunjukkan semua variable independen yaitu ukuran pemerintah, aksesibilitas, dan opini audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah secara digital.

Keywords: Aksesibilitas, Opini Audit, Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah Digital

ABSTRACT

Digitalization disclosure is considered capable of reaching all aspects of society and can be accessed at any time. Advances in technology will make all information accessible easily, cheaply, and quickly. This study aims to analyze the influence of government size, accessibility, and audit opinion on the disclosure of digital local government financial reports. Population and research sample are Local Government Financial Statements. Central Java Province, as many as 29 Regency Governments and 6 City Governments for the 2015-2018 Fiscal Year that have been audited by the Supreme Audit Agency. The analysis technique uses multiple regression with

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank

² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank

⁴ Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Musi Charitas

the Fixed Effect Model. The results show that all independent variables, namely government size, accessibility, and audit opinion have a positive and significant effect on the disclosure of digital local government financial statements.

Keywords: *Accessibility, Audit Opinion, Disclosure of Digital Local Financial Statements*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi berkembang pesat, khususnya reformasi keuangan pada sektor publik di Indonesia untuk dituntut semakin transparan dalam pengungkapan. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik yang menggunakan himpunan dana dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat (Bastian 2006).

Bentuk transparansi yang dilakukan kepala daerah dengan mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah secara sukarela melalui internet sehingga seluruh *stakeholder* dapat memperoleh informasi di lingkungan pemerintahan daerah. Pengungkapan digitalisasi dinilai mampu menjangkau kepada semua aspek masyarakat bukan hanya yang mempunyai kepentingan saja tetapi juga dapat diakses kapanpun (Bertot *et al.* 2010). Adanya kemajuan teknologi yang semakin maju membuat semua informasi dapat diakses dengan mudah dan murah.

Akuntansi sektor publik mempunyai misi penting untuk terciptanya komunikasi yang efektif berupa informasi yang berguna pada sistem pengungkapan pelaporan keuangan berbasis internet. Komunikasi yang efektif dan didukung dengan kemajuan teknologi diharapkan mampu memenuhi tingkat aksesibilitas dalam ketersediaan informasi.

Sehubungan pelaksanaan *e-government* maka Kementerian Telekomunikasi dan Informatika mengeluarkan aturan melalui *blueprint e-government* untuk pemerintah daerah. Pengungkapan informasi pada website resmi pemda masih bersifat sukarela (*voluntary*), sebagai akibatnya tingkat pengungkapan informasi masih beragam di setiap website pemda. Motivasi untuk melakukan publikasi informasi keuangan pemerintahan daerah pada website tergantung pada urgensi masing-masing pemda.

Transparansi mengungkapkan laporan keuangan secara sukarela di internet dimanfaatkan bagi seluruh *stakeholder* untuk memperoleh informasi yang ada di lingkungan pemerintahan (Afryansyah 2013). Pada prakteknya pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sangat bervariasi. Namun demikian, hanya ada beberapa pemerintahan daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari internet sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan. Alasan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan melakukan atau tidak melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela dinilai dapat digunakan sebagai media efektif dan efisien dalam pelaporan keuangan. Karena hal ini dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat akan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Daerah yang memiliki tingkat akses internet tinggi terbukti memiliki pengungkapan internet yang lebih banyak.

Penelitian Laswad *et al.* (2005); dan Styles dan Tennyson (2007) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan sejumlah pengungkapan di sektor publik masih terbatas. Namun seiring dengan perkembangan teknologi tuntutan kebutuhan masyarakat atas informasi laporan keuangan yang dapat diakses melalui internet, hanya bisa diperoleh bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang baik (Wilopo 2017). Penelitian tentang pengungkapan di sektor public

seperti Mulyana (2006); dan Rahim dan Martani (2012) menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan *website*. Namun berbeda oleh Asyari dan Helmy (2020) menemukan bahwa pemda kabupaten/kota di Bengkulu belum secara maksimal memanfaatkan teknologi informasi dalam *e-government*, sehingga aksesibilitas penyelenggaraan pemerintahan sulit dilakukan. Temuan ini diperkuat oleh Yuliani (2017) bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh positif pada transparansi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Ukuran Pemerintah dapat dilihat dari besaran asset yang dimiliki pemerintah daerah, semakin banyak aset yang dimiliki pemerintah daerah menandakan semakin besar modal yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Hal ini perlu diketahui stakeholder yang lain melalui pengungkapan informasi. Penelitian Rikafitri (2017) menemukan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh signifikan negatif pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Hasil berbeda dengan Ningsih (2018); Nosihana dan Yaya (2016); Simbolon *et al.* (2015); dan Puspita dan Martani (2010) menyebutkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan berbasis internet. Sedangkan Mulyono (2013) dan Laswad *et al* (2005) menemukan ukuran pemerintahan tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet.

Pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan cenderung melakukan publikasi laporan keuangan di internet. Sebaliknya jika semakin tinggi penyimpangan dalam laporan keuangan maka akan mendorong pemerintah daerah untuk menutupi informasi keuangan, sehingga menjadikan publikasi laporan keuangan rendah (Handayani, 2010). Hal tersebut disimpulkan bahwa hasil audit LKPD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan berdampak pada kepercayaan pemerintah dalam melakukan pengungkapan luas untuk menghindari persepsi negatif dari publik. Penelitian Rahim dan Dwi (2016); Hiola *et al.* (2015); Chen (2015); Prasasti (2017); dan Andriani (2012) menunjukkan bahwa opini audit memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website*. Namun hasil negatif ditemukan oleh Prabowo (2016). Sedangkan Lestari dan Rahardjo (2020); Saraswati *et al* (2019); Nosihana dan Yaya (2016); Junaedi (2015); dan Trisnawati dan Achmad (2014) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara opini audit dengan pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemda.

Penelitian ini bertujuan menguji kembali tentang aksesibilitas, ukuran pemerintah, dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah berbasis internet, mengingat berdasarkan hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian tentang akses internet terhadap pengungkapan informasi pada *website* pemda masih terbatas. Penelitian ini menggunakan kekayaan daerah sebagai variabel kontrol

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Stewardship Theory

Stewardship Theory memiliki pandangan bahwa manajemen sebagai pihak yang dapat mengambil tindakan maupun keputusan sebaik baiknya untuk kepentingan publik pada umumnya dan kepentingan *stakeholder* pada khususnya. Hal ini akan membuat setiap kepentingan dari *steward* maupun *principal* dapat difokuskan untuk kepentingan tujuan organisasi.

Implikasi teori *stewardship* pada penelitian bahwa pemerintah sebagai pengelola anggaran diharapkan dapat bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Pemerintah daerah sebagai instansi yang dipercaya untuk melaksanakan tugas secara tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanahkan kepadanya (Donaldson dan Davis 1991). Dalam konteks sektor publik teori ini mempunyai tujuan pada pelayanan publik dengan menganut regulasi yang telah ditetapkan. Tujuan regulasi untuk menjembatani kepentingan rakyat yang berbeda pendapat dan mengarahkan opini masyarakat maupun tingkah laku agar selaras dengan regulasi yang telah disetujui dan ditetapkan.

Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Pelaporan Keuangan Website

Perkembangan teknologi informasi digitalisasi menjadikan pertukaran informasi yang lebih mudah dan murah. Murahnya harga untuk mengakses internet dan beragamnya pilihan alat untuk mengakses internet menjadikan tingkat akses internet semakin lama semakin meningkat. Tingkat akses internet di Indonesia beragam dan dipengaruhi oleh kondisi demografi daerah seperti tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan kecepatan akses internet, sehingga akan mempengaruhi besaran masyarakat yang mengakses internet. Survey hasil Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penggunaan internet pada tahun 2014 di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 34,9%, Pertumbuhan ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun terlebih lagi disaat pandemic Covid-19. Akses internet merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan. Daerah dengan penduduk lebih besar tentunya kebutuhan akses internet juga lebih besar, hal ini akan menjadikan pemerintah daerah memiliki tekanan yang lebih besar untuk mengungkapkan informasi pemerintahan berbasis *website* karena pengawasan publik dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan website

Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Pelaporan Keuangan Website

Semakin besar ukuran pemerintah, maka semakin besar jumlah dan transfer kekayaan yang dikelola oleh pemerintah daerah, dengan demikian biaya pemantauan yang digunakan semakin tinggi. Skala pemerintah yang lebih besar menjadikan kebutuhan pengungkapan juga lebih banyak. Hal ini dapat dilakukan melalui media internet sebagai sarana yang efisien, cepat dan memuaskan bagi pemerintah daerah. Besaran ukuran pemerintahan dapat terindikasi kegiatan penyelewengan aset sehingga perlu dilakukan pemantauan atau pengawasan. Hubungan ukuran pemerintah dengan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet dapat dijelaskan dengan teori *stewardship* bahwa pemerintahan yang besar tentunya perlu diikuti pengawasan pengelolaan aset yang lebih baik dengan tujuan kepentingan umum untuk mencapai kesuksesan pengelolaan aset daerah secara maksimal. Pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui *e-government* akan mempermudah proses pengawasan dari luar institusi pemerintah (Puspita dan Martani 2010). Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan *website*

Pengaruh Opini Audit Terhadap Pelaporan Keuangan *Website*

Opini audit yang diberikan BPK menunjukkan tingkat kewajaran pada Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD). Opini audit ditentukan dari jumlah temuan audit yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit BPK. Opini audit juga didasarkan kepada pengungkapan informasi yang dilakukan Pemda dalam LKPD nya, atas kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan daerah. Banyak sedikitnya temuan audit akan menentukan keputusan opini audit. Semakin baik opini audit yang diterima pemda menunjukkan kewajaran LKPD, hal ini akan menjadikan pemda segera menginformasikan kondisi tersebut melalui *e government* agar segera diketahui oleh *stakeholder* lain (Liestiani 2008). Jumlah temuan yang sedikit akan menghasilkan opini audit yang bagus, yang menunjukkan pelaporan dan pelaksanaan keuangan yang baik dan bebas salah saji sehingga pemda cenderung tidak akan menutup-nutupi informasi pelaksanaan pemerintahnya yang baik tersebut. Pengungkapan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan yang bagus tersebut akan memberikan sinyal positif bagi masyarakat, sehingga pemda yang memiliki opini audit yang baik cenderung melakukan pengungkapan yang lebih banyak. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H3 : Opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan *website*

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu informasi keuangan yang terdapat pada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2015-2018 yang telah diaudit BPK berupa *softfile* LKPD dengan format *pdf*. Informasi data diperoleh dengan mengamati secara langsung pada *website* resmi masing masing pemerintah daerah dari Situs Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (www.depdagri.go.id).

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah LKPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Pemerintah Kabupaten dan 6 Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2015-2018 yang telah di audit oleh BPK. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu melalui situs resmi *website* Pemerintah Daerah. Data variabel independen dan variabel kontrol diperoleh dari LKPD yang telah diaudit oleh BPK melalui situs resmi (www.bpk.go.id) berupa salinan file LKPD yang telah di audit oleh BPK dengan format *pdf*.

Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Merupakan pencantuman informasi keuangan perusahaan melalui *website* pemda yang bersifat sukarela (Lai et. al. 2009). Istilah ini disebut *Internet Financial Reporting Disclosure (IFRD)*. Pengukuran ini menggunakan indeks skoring tingkat pengungkapan laporan pada *website* masing masing pemda. Pemberian nilai 0 jika tidak sesuai dengan syarat indeks (tabel 1).

Tabel 1
Indeks Keteraksesan IFR

Skor	Persyaratan
1	Jika <i>website</i> resmi pemerintah daerah dapat ditemukan pada halaman pertama pencarian <i>google</i> dengan mengetik nama pemerintah daerah
+1	Jika hanya diperlukan tiga kali klik atau kurang untuk melihat <i>Internet Financial Reporting (IFR)</i> dalam <i>website</i> pemda
+1	Jika data IFR dapat diunduh dalam format pdf. atau html.
+1	Jika terdapat data IFR tahun sebelumnya dalam <i>website</i> pemerintah daerah

Sumber: (Styles & Tennyson, 2007) dengan modifikasi

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan besaran pemerintah daerah dan digunakan sebagai proksi informasi pada laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan *Natural Logaritma (Ln)* Total Aset seperti Rora (2010). Penggunaan Ln pada penelitian ini untuk mengurangi fluktuasi berlebihan sehingga proksi dengan nominal milyaran hingga triliyunan dapat disederhanakan tanpa mengurangi nilai aset yang sebenarnya.

Aksesibilitas

Tingkat penetrasi internet menunjukkan jumlah penduduk yang mengakses internet pada masing-masing daerah. Informasi mengenai aksesibilitas internet ini diperoleh dari hasil survey APJII. APJII menyediakan data penentuan tarif internet dan tarif jasa telekomunikasi (Sekaran dan Bougie 2009). Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil survei APJII bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015. Penelitian ini, menggunakan tingkat penetrasi yang sama untuk setiap kabupaten dan kota pada provinsi yang sama.

Opini Audit

Opini audit adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh auditor terdaftar terkait dengan pemeriksaan yang sudah sesuai dengan norma dan aturan-aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan pendapat auditor tentang kewajaran dari laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit diukur dengan dummy variable. Opini wajar tanpa pengecualian diberi notasi score 1 dan opini non wajar tanpa pengecualian diberi notasi score 0.

Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh terutama dari pungutan retribusi pajak dari masyarakat yang ada di daerah (Halim 2007:232). Proksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penelitian ini menggunakan *Natural Logaritma (Ln)* untuk mengurangi fluktuasi berlebihan nominal milyaran atau triliyunan dapat disederhanakan tanpa mengubah nilai asli PAD. Variabel PAD diukur dengan total Pendapatan Daerah.

Tehnik Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel yaitu gabungan antara data *cross section* dengan data *time series*, yaitu pada unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda (Ghozali & Ratmono, 2013). Adapun persamaan yang dapat diaplikasikan dalam model penelitian ini sebagai berikut:

$$IFRD_{it} = \beta_0 + \beta_1Aksesit + \beta_2WEALTH_{it} + \beta_3OA_{it} + \beta_4KM_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- IFRD_{it} = *Internet Financial Reporting Disclosure*
- Aksesit = Aksesibilitas Internet
- WEALTH_{it} = Kekayaan Pemerintah Daerah
- OA_{it} = Opini Audit
- KM_{it} = Kemandirian Daerah
- i** = subjek atau Kabupaten/Kota ke-**i**
- t** = tahun ke **t**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif statistik memberikan deskripsi data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standart deviasi, minimum dan maksimum dari variabel IFRD, aksesibilitas, ukuran pemerintahan, opini audit, dan kemandirian daerah. Berikut hasil statistik deskriptif data penelitian:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	IFRD	UP	AKSES	KD
Mean	0.685714	28.84231	16.96422	26.46130
Median	0.750000	28.73850	16.75650	26.42300
Maximum	1.000000	31.06400	19.93800	28.23100
Minimum	0.250000	28.11200	14.20900	25.74700
Std. Dev.	0.256869	0.494603	0.694784	0.407634
Skewness	-0.428781	2.285099	1.155482	1.751663
Kurtosis	2.073405	10.59214	7.635365	8.360020
Jarque-Bera	9.298277	458.0761	156.4918	239.1848
Probability	0.009570	0.000000	0.000000	0.000000
Observations	140	140	140	140
Cross sections	35	35	35	35

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah data observasi yaitu 140 (seratus empat puluh) observasi yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 4 (empat) tahun. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu IFRD yang memiliki nilai

minimum sebesar 0.250000 dari Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Semarang, dan Pemerintah Kota Salatiga. Nilai maksimum sebesar 1.00000 dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang. Rata-rata variabel IFRD sebesar 0.685714 dengan nilai standart deviasi sebesar 0.256869 yang artinya standart deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

Variabel ukuran pemerintah (UP) memiliki nilai minimum sebesar 28.11200 terdapat pada pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 31.06400 terdapat pada pemerintah Kota Semarang pada tahun 2018. Rata-rata variabel ukuran pemerintah sebesar 28.84231 dengan standart deviasi sebesar 0.494603. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang menunjukkan hasil yang baik, karena nilai standar deviasi yang menggambarkan penyimpangan dari data tersebut lebih kecil dari rata-ratanya.

Variabel Aksesibilitas (AKSES) memiliki nilai minimum sebesar 14.20900 terdapat pada pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 19.93800 terdapat pada pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016. Rata-rata variabel kekayaan daerah sebesar 16.96422 dengan standart deviasi sebesar 0.694784. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang menunjukkan hasil yang baik, krena nilai standar deviasi yang menggambarkan penyimpangan dari data tersebut lebih kecil dari rata-ratanya.

Variabel kemandirian daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 25.74700 terdapat pada pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 28.23100 terdapat pada pemerintah Kota Semarang pada tahun 2018. Rata-rata variabel pendapatan asli daerah sebesar 26.46130 dengan standar deviasi sebesar 0.407634. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang menunjukkan hasil yang baik, karena nilai standar deviasi yang menggambarkan penyimpangan dari data tersebut lebih kecil dari rata-ratanya. Sedangkan variabel opini audit dapat dilihat pada table 3 berikut:

Tabel 3
Opini Audit kabupaten/Kota Jawa Tengah

Opini Audit	2015	2016	2017	2018
WDP	23	14	4	1
WTP	12	21	31	34

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 3 menunjukkan hasil audit BPK dari 35 pemerintah daerah di Jawa Tengah yang meliputi pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota, 35 di antaranya mendapatkan opini WTP untuk LKPD tahun 2015, BPK hanya memberikan opini WTP pada 12 pemerintah daerah di Jawa Tengah. Selanjutnya tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi WTP.

Analisis regresi data panel dalam penelitian ini dengan pendekatan *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* (Winarno 2015). Selanjutnya untuk menentukan model mana yang terbaik maka, dibutuhkan uji Chow (*Chow test*) dan uji Hausman.

Uji Chow bertujuan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan untuk memilih antara model *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model*. Hasil uji Chow terlihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
	1128909855		
	2809472000		
Cross-section F	000000	(34,101)	0.0000
Cross-section Chi-square	7923.596768	34	0.0000

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Hasil uji Chow pada tabel 4 menunjukkan bahwa profitabilitas *Cross-section F* sebesar $0,0000 < \alpha$ (5%). Hal tersebut menyimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* yang dipilih dapat digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya uji Hausman digunakan untuk pemilihan model yang akan dilakukan antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Hasil uji Hausman terlihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	0.06429

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5 hasil nilai *p-value Cross-section random* yaitu sebesar $0,06429 > \alpha$ (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh hasil metode yang dianggap baik melalui uji Hausman, maka *Fixed Effect Model* digunakan untuk analisis regresi linier berganda data panel. Selanjutnya uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji F dan uji t menggunakan *Fixed Effect Model* dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6
Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.715714	2.92E-12	2.35E+11	0.0000
UP	0.032243	1.17E-13	8.567765	0.0000
AKSES	0.022714	3.37E-14	2.659342	0.0312
OA	0.027279	1.58E-12	5.524972	0.0104
KD	0.023670	9.59E-14	3.034561	0.0240
<i>Effects Specification</i>				

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.685821	Log likelihood	3958.805
Adjusted R-squared	0.628360	F-statistic	5.834285
S.E. of regression	1.49E-13	Prob(F-statistic)	0.000000
Sum squared resid	2.25E-24	Durbin-Watson stat	2.275324

Sumber: Data sekunder diolah,2020

Adapun persamaan regresi dari tabel 6 dari Estimasi *Fixed Effect Model* sebagai berikut:

$$IFRD_{it} = 0.715714 + 0.032243 UP_{it} + 0.022714 AKSES_{it} + 0.027279 OA_{it} + 0.023670 KD_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

1. Nilai koefisien ukuran pemerintah daerah (UP) sebesar 0.032243 dengan t hitung 8.567765 > t tabel 2,35429 dan nilai signifikansi 0,0000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel UP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IFRD. Maka disimpulkan H1 terbukti.
2. Nilai koefisien aksesibilitas (AKSES) sebesar 0.022714 dengan t hitung 2,659342 > t tabel 2,35429 dan nilai signifikansi dan signifikansi 0,0312 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel AKSES berpengaruh positif dan signifikan terhadap IFRD. Maka disimpulkan H2 terbukti.
3. Nilai koefisien opini audit (OA) sebesar 0.027279 dengan t hitung 5.524972 > t tabel 2,35429 dan signifikansi 0.0104 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel OA berpengaruh positif signifikan terhadap IFRD. Maka disimpulkan H3 terbukti
4. Nilai koefisien kemandirian daerah (KD) sebagai variabel kontrol sebesar 0.023670 dengan t hitung 3.034561 > t tabel 2,35429 dan signifikansinya sebesar 0.0240. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel KD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IFRD.

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa besarnya nilai Adjusted R-Square sebesar 0,628360 atau pada nilai 62,83%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel UP, AKSES, OA dan KD mampu menjelaskan variasi variabel IFRD sebesar 62,83%. Demikian pula nilai prob F-statistic sebesar 0,000000 < 0,05. Sedangkan nilai F hitung 5.834285 > F tabel 2,44 menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini dapat mempengaruhi IFRD secara signifikan. Maka dapat disimpulkan model penelitian ini adalah baik (Ghozali dan Ratmono 2013).

Berdasarkan hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di *website*. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah mampu mempengaruhi tingkat IFRD, maka dengan ukuran asset yang dimiliki pemerintah, bahwa semakin tinggi ukuran asset tersebut dapat memberikan dampak tekanan pada pemda lebih untuk melakukan pengungkapan laporan secara digital. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan semakin tinggi ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin tinggi tekanan yang diterima pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangan melalui *website*. Dengan mengetahui pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih luas dan lengkap tentunya akan semakin banyak masyarakat yang kritis akan kondisi keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan

penelitian Ningsih (2018); Nosihana dan Yaya (2016); Simbolon *et al.* (2015); dan Puspita dan Martani (2010) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah mempengaruhi transparansi pemerintah daerah melalui pengungkapan. Hasil juga diperkuat oleh Debreny *et al.* (2002) semakin besar ukuran pemda maka semakin besar keuntungan yang diperoleh pemda bila mengungkapkan informasi melalui media internet.

Berdasarkan hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemda secara digital. Akses internet merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan penggunaan teknologi informasi sudah dilakukan untuk semua aktivitas di pemda sehingga menjadikan pertukaran informasi lebih mudah, cepat dan murah. Ketersediaan akses internet akan memudahkan monitoring terhadap kegiatan pemda. Beragamnya pilihan alat untuk mengakses internet dapat diperoleh dengan mudah dan murah sehingga menjadikan tingkat akses internet semakin meningkat. Meningkatnya akses internet menunjukkan bentuk pengawasan secara *online* menjadi lebih besar dan lebih efisien sehingga tekanan untuk menyajikan informasi pada *website* menjadi lebih besar. Hal ini akan berujung pada pengungkapan informasi yang berbasis *website* menjadi meningkat, karena informasi akan lebih cepat diterima pengguna. Lebih jauh lagi tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan kecepatan akses internet akan mempengaruhi besarnya jumlah masyarakat dalam mengakses internet. Daerah yang memiliki penduduk lebih besar biasanya diikuti dengan akses internet juga besar, tentunya akan memiliki tekanan yang lebih besar untuk mengungkapkan informasi pemerintahan pada *website* karena pengawasan publik dapat dilakukan dengan lebih mudah. Terlebih pada situasi pandemi penggunaan teknologi informasi digital menjadi andalan dalam melakukan aktivitas. Temuan ini sejalan dengan Mulyana (2006) dan Rahim & Martani (2012) menyatakan bahwa tingkat akses internet memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website*.

Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap IFRD pemda di *website*. Kondisi ini didukung dengan meningkatnya jumlah opini audit yang diterima kabupaten/kota di Jawa Tengah dari tahun ke tahun yaitu dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP. Diterimanya opini audit WTP menunjukkan bahwa sedikitnya jumlah temuan audit. Kondisi ini menunjukkan pelaporan dan pelaksanaan keuangan sudah dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Hal ini menjadikan pemda terdorong memberikan informasi secara transparan tentang pelaksanaan pemerintahannya yang sudah sesuai aturan. Adanya pengungkapan informasi tersebut akan memberikan sinyal positif bagi masyarakat. Opini audit BPK menunjukkan tingkat kewajaran pada LKPD. Opini audit diberikan berdasarkan pada jumlah temuan audit dan kesesuaian pengungkapan informasi yang dilakukan pemda dalam LKPD dengan ketentuan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan daerah. Semakin banyak temuan maka akan berdampak opini dengan pengecualian. Sehingga opini audit memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada LKPD. Semakin banyak jumlah temuan yang diperoleh BPK, maka akan semakin banyak informasi yang diminta BPK dalam LKPD (Liestiani 2008). Hasil penelitian sejalan dengan Rahim dan Dwi (2016); Hiola *et al.* (2015); Chen (2015); Prasasti (2017); dan Andriani (2012) menunjukkan bahwa opini audit memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website*.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil analisis data panel dan pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran Pemerintah (UP) memiliki arah hubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah *website*.
2. Aksesibilitas (AKSES) memiliki arah hubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah *website*.
3. Opini Audit (OA) memiliki arah hubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah *website*.
4. Ukuran Pemerintah (UP) memiliki pengaruh dominan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah *website*.

IMPLIKASI

Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam membentuk regulasi, penghargaan dan sanksi yang dikenakan agar praktik transparansi laporan keuangan digital meningkat. Regulasi yang diterapkan tidak hanya sekedar Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012, melainkan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang. Sanksi yang diberlakukan dapat berupa teguran tertulis, peringatan tertulis, denda, penundaan penyaluran DAU, bahkan pengurangan DAU. Untuk memotivasi Pemda atau Badan Publik lainnya dalam meningkatkan praktik transparansi laporan keuangan, Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Publik dan PPID dapat meningkatkan penyelenggaraan KIP Awards hingga tingkat daerah secara rutin setiap tahun. Pemberlakuan sistem monitoring dan evaluasi tata kelola *website* pemda secara transparansi. Penelitian ini dapat memotivasi pemda dalam membangun, mengevaluasi, dan mengembangkan *e-government* maupun *m-government* agar publik lebih mudah berkomunikasi dengan pemerintah dan mengawasi jalannya pemerintahan serta mewujudkan adanya *good and clean governance*.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak dapat mengeneralisasi untuk seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.
2. Nilai *Adjusted R square* sebesar 62,83% dipandang masih rendah artinya pengungkapan laporan keuangan berbasis *website* belum secara maksimal dapat dijelaskan oleh variable dalam penelitian ini. Kondisi ini menunjukkan kesadaran pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan melalui *website* masih rendah.

Dengan mempertimbangkan hasil dan keterbatasan yang ada, maka peneliti selanjutnya perlu memperhatikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambahkan variabel penelitian yang diduga memiliki pengaruh besar terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. *Website* pemda yang *offline* perlu dilakukan pengecekan dan perbaikan secara berkala sehingga informasi selalu *terupdate* terkait pengelolaan keuangan daerah secara lengkap sesuai amanat peraturan perundangan, mudah diakses, tepat waktu dan pengungkapan yang runtut dengan tahun sebelumnya.
3. Perlu menggunakan data LKPD terbaru dengan periode yang lebih panjang sehingga lebih jelas perkembangan transparansi LKPD secara digital khususnya Jawa Tengah.

4. Perlu mengembangkan studi komparasi dengan wilayah Jawa Timur maupun Jawa Barat untuk melihat kepatuhan/ketaatan pemda pada SAP melalui pengungkapan LKPD secara digital, dengan harapan dapat digeneralisasi untuk wilayah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, R. D. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. In *Accounting Analysis Journal* Vol. 3, Issue 4.
- Agnecia, H., Simbolon, U., & Kurniawan, C. H. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 30(1), 54–70.
- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 100.
- Andriani, E. (2012). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. (17) (PDF) *Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhinya*.
- Asyari SA, Helmy Herlina. (2020). Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*. Vol. 2 No.1. Hal:2314-2330
- Junaedi, Anggaran, P., & Pengungkapan, T. (2015). Politeknik Indonusa Surakarta ABSTRAKSI. *Saintech Politeknik Indonusa Surakarta ISSN*, 2.
- Chen, et. Al, 2015. Disclosure of Government Financial Information and the Cost of Local Government's Debt Financing-Empirical Evidance from Provincial Investment Bonds for Urban Construction. *China Journal of Accounting Research* 9 (2016) 191-206.
- Debreny, R., Gray, G. L., & Rahman, A. (2002). The Determinants Of Internet Financial Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy* Vol 2, 371-394
- Hiola, Y., Rosidi, & Mulawarman, A. D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan di Website dengan Opini Audit dan Lingkungan Politik Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Provinsi, Kota Dan Kabupaten Di Sulawesi).
- Hudoyo, Y. T., & Mahmud, A. (2014). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Jeckly, D.J., & Eka, A.S. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Denpasar*.
- Khan, M. N. A. A. & Ismail N. A. (2011). The level of internet financial reporting of Malaysian companies. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 27–39. (17) (PDF) *Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhinya*.

- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants Of Voluntary Internet Financial Reporting By Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101-121.
- Lestari, Ekrak Puji, Rahardjo, Shiddiq Nur. (2020). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Pada Laman Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2018. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 9, No.3, Hal: 1-13
- Mulyono, I. (2013). Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Di Internet. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi*, 2, 17-18.
- Ningsih, R. F. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 87-101.
- Prabowo, D. W. A. (2016). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD114) Melalui Internet (IFLGR) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis MEDIA EKONOMI*, XVI No. 1(1), 1689-1699.
- Prasasti Murni Prasasti. (2017). Opini Audit, Tingkat Kemandirian, dan Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*. Volume 9, No 2, Oktober. Hal. 94-103 ISSN 2088-5091 (print) 2597-6826 (online)
- Priyastiwati, P., & Saputra, N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Karakteristik Daerah Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 6(2), 157-172. <https://doi.org/10.32477/jrm.v6i2.356>
- Puspita, P., & Martani, D. (2010). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi. *Revista Argentina de Cardiologia*
- Rahim, Wanda Mustika dan Martani, Dwi. (2012). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetensi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Website Pemerintah Daerah. Universitas Indonesia: Jakarta
- Rahman, A., Sutaryo, & Budiartanto, A. (2013). Determinan Internet Financial Reporting Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*.
- Rikafitri, R. (2017). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Pada Website Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Psikologi Perkembangan*.
- Saraswati, Triana, Laeli Budiarti, Yudha Aryo Sudibyo. (2019). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Review dan Bisnis Akuntansi Indonesia*, Vol.3 No.1. Hal :85-101.
- Setyowati, L. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Esensi*, 6(1), 45-62.
- Sinaga, Y. F. (2011). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan DI Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah.

Verawaty. (2017). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Sumatera Selatan. *AKUISISI Journal of Accounting & Finance*. Vol.3 No. 2, Page 92-107. ISSN : Print 1978-6579 . Online 2477-2984

Wilopo. Indra Agung. Juni 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. VII No.1: 61-78

Yuliani. Nur Laila. Maret 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 24, No. 11. Hal. 1 - 14 . ISSN: 1412-31261